

Peran PBB Melalui MDGs Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Gita Kartika Sari

Manajemen, Institut Budi Utomo Nasional, Majalengka, Indonesia

*Corresponding Author: kikandriya68@gmail.com

Article History

Received 2024-02-28

Accepted 2024-07-03

Keywords

Millenium Development Goals
Development People

Abstract

This study aims to understand, explore, and describe the UN programs aimed at alleviating poverty in poor and developing countries. The research employs a descriptive method to analyze the role of the United Nations through MDGs in enhancing Indonesia's Human Development Index (HDI). A literature review method is utilized to gather and analyze relevant data, examining the impact of MDGs on Indonesia's socio-economic development. The findings reveal that the Millennium Development Goals (MDGs) emerged as a global initiative to address challenges faced by developing countries, particularly those with low Gross Domestic Product (GDP). Despite various financial and developmental aid efforts, many countries still grapple with fundamental issues such as poverty, hunger, limited healthcare access, inadequate housing, and restricted education. The UN Secretary-General initiated MDGs following the Millennium Summit, where 189 world leaders committed to improving global living conditions. Each developing country, including Indonesia, adopts and adjusts national development strategies to achieve MDGs' primary objectives. MDGs provide a framework rather than prescriptive guidelines, allowing flexibility for countries to tailor their approaches based on local conditions. Indonesia's medium-term development agenda focuses on creating a secure, fair, and democratic environment while enhancing citizens' well-being. Key priorities include poverty alleviation, unemployment reduction, increased investment, rural development, improved access to education and healthcare, social protection, human capital quality, and infrastructure development.

Kata Kunci

Millenium Development Goals
Pembangunan Manusia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan program PBB yang dikeluarkan PBB dalam mengentaskan kemiskinan pada Negara-negara miskin dan berkembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis peran Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui MDGs dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, mengkaji dampak MDGs terhadap pembangunan sosial-ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkap fakta bahwa Pembangunan Milenium (MDGs) muncul sebagai inisiatif global untuk mengatasi tantangan yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang, terutama yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) rendah. Meskipun telah berbagai upaya bantuan keuangan dan pembangunan, banyak negara masih menghadapi masalah mendasar seperti kemiskinan, kelaparan, akses kesehatan yang terbatas, perumahan yang tidak layak, dan pendidikan yang terbatas. Sekretaris Jenderal PBB memulai MDGs setelah KTT Milenium, di mana 189 pemimpin dunia berkomitmen untuk memperbaiki kondisi kehidupan global. Setiap negara berkembang, termasuk Indonesia, mengadopsi dan menyesuaikan strategi pembangunan nasional untuk mencapai tujuan utama MDGs. MDGs memberikan kerangka kerja daripada pedoman yang preskriptif, memungkinkan fleksibilitas bagi negara-negara untuk menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kondisi lokal. Agenda pembangunan jangka menengah Indonesia berfokus pada menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan demokratis sambil meningkatkan kesejahteraan penduduk. Prioritas utama termasuk pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan investasi, pembangunan pedesaan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, kualitas penduduk, dan pembangunan infrastruktur.

Copyright © 2024 by Author(s).
This is an open access article under
the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Keterbelakangan yang melanda negara-negara dunia ketiga telah menjadi permasalahan global yang membutuhkan penanganan serius dan komprehensif. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara negara maju dan berkembang, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Bantuan keuangan dan program pembangunan yang telah dijalankan ternyata belum berhasil secara signifikan dalam mengeluarkan negara-negara tersebut dari jeratan kemiskinan. Kategori kemiskinan yang paling mendasar masih membelit negara-negara dengan Gross Domestic Product (GDP) terendah, menciptakan kemiskinan yang sulit dihilangkan.

Isu-isu utama yang masih membayangi negara-negara berkembang meliputi kelaparan, kesehatan yang buruk, permukiman tidak layak, dan akses pendidikan yang terbatas. Kelaparan kronis tidak hanya mengancam nyawa jutaan orang, tetapi juga menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak-anak, yang pada gilirannya akan mempengaruhi produktivitas dan potensi ekonomi masa depan. Masalah kesehatan, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak, prevalensi penyakit menular, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, terus menjadi tantangan besar. Sementara itu, masalah permukiman tidak layak dan sanitasi buruk menjadi sumber berbagai masalah kesehatan dan sosial. Di bidang pendidikan, meskipun ada kemajuan dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, kualitas pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja masih menjadi persoalan serius.

Menghadapi realitas ini, komunitas internasional menyadari perlunya pendekatan baru yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pada hasil konkret. Dengan latar belakang inilah Sekretaris Jenderal PBB memelopori sebuah program baru dengan tujuan akhir mencapai kehidupan yang lebih baik bagi seluruh penduduk dunia (Mughtar, 2014). Inisiatif ini kemudian mengkristalisasi dalam sebuah pertemuan bersejarah yang dikenal sebagai The Millennium Summit, di mana 189 kepala negara berkumpul untuk merumuskan visi bersama mengenai masa depan global yang lebih adil dan sejahtera (Hannan, 2018; Supriatna, 2021).

Pertemuan tersebut menghasilkan Millennium Declaration, sebuah dokumen yang menjadi tonggak penting dalam upaya global mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Deklarasi ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya program Millennium Development Goals (MDGs), yang menetapkan delapan tujuan ambisius yang harus dicapai pada tahun 2015 (Yuningsih, 2014). Tujuan-tujuan tersebut mencakup pengentasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, pencapaian pendidikan dasar universal, promosi kesetaraan gender, pengurangan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pemberantasan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

MDGs menawarkan kerangka kerja yang komprehensif namun fleksibel bagi negara-negara untuk menyesuaikan implementasi dengan kondisi lokal mereka. Setiap negara berkembang dengan kemiskinan ekstrim didorong untuk mengadopsi strategi pembangunan nasional yang sesuai untuk mencapai MDGs. Pendekatan ini mengakui bahwa tidak ada solusi "satu ukuran untuk semua" dalam mengatasi masalah pembangunan yang kompleks.

Di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia, pemerintah merespons MDGs dengan menetapkan tiga agenda pembangunan jangka menengah. Agenda ini berfokus pada penciptaan lingkungan yang aman, adil, dan demokratis, serta peningkatan kesejahteraan rakyat (Luhulima, 2014). Prioritas utama meliputi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, pengembangan pedesaan, peningkatan akses

pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, perlindungan sosial, peningkatan kualitas kependudukan, dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Namun demikian, implementasi MDGs di negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu kesenjangan yang signifikan adalah dalam aspek pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Smith dan Jones (2018) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan MDGs, tetap ada ketimpangan signifikan dalam pemerataan manfaat pembangunan di antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tinggi.

Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan lingkungan yang kompleks. Misalnya, upaya pengentasan kemiskinan seringkali berbenturan dengan isu-isu lingkungan, seperti deforestasi dan degradasi sumber daya alam. Di sisi lain, perubahan iklim global semakin memperparah kerentanan masyarakat miskin terhadap bencana alam dan gangguan mata pencaharian.

Artikel ini akan mengeksplorasi secara mendalam peran PBB melalui MDGs dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif dan studi kepustakaan, penelitian ini akan menganalisis dampak serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi MDGs di negara berkembang. Fokus khusus akan diberikan pada kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, serta evaluasi terhadap efektivitasnya dalam mencapai target-target MDGs.

Lebih lanjut, artikel ini juga akan membahas transisi dari MDGs ke Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi pada tahun 2015, serta implikasinya bagi strategi pembangunan Indonesia di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang upaya global untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan implementasi program pembangunan di negara-negara berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dari Februari sampai dengan bulan Agustus. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan dalam menganalisis suatu objek berdasarkan fakta aktual mengenai peran PBB melalui MDGs dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. Metode ini mengumpulkan dan menyusun data atau menganalisis suatu fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Dalam metode ini pula dipelajari masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu usaha mencari data melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website/internet tentang Indeks Pembangunan Manusia yang menurut penulis ada relevansinya dengan penulis lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MDGs merupakan sebuah deklarasi yang menghimpun para pemimpin dunia untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan pembangunan fundamental dimana setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya (Adisasmito, 2008; Ramadhani &

Majapahit, 2014). Delapan program MDGs yaitu: menghapus kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian bayi, memperbaiki kesehatan ibu, mencegah HIV-AIDS, malaria dan penyakit lainnya, lingkungan berkelanjutan dan membangun jaringan kemitraan global.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia masih tergolong buruk. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan rendahnya daya beli masyarakat yang berimbas pada pola konsumsi masyarakat Indonesia. Elemen MDGs yang cukup berpengaruh adalah ditingkatkannya alokasi dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Da digulirkannya bantuan operasional sekolah (BOS) sebagai upaya perwujudan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia

Dinamika pembangunan Negara selain tercermin pada pendapatan negara yang terus menanjak juga kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat. Dari pemerinkatan IPM masyarakat bias membaca sejauh mana kemajuan sebuah Negara dalam mengembangkan sumber daya manusia. Berdasarkan beberapa penilaian, diantaranya usia harapan hidup menempatkan Indonesia di posisi rendah di kawasan Asia Tenggara. Pemerinkatan ini juga menjadi sebuah cermin adanya kegagalan dalam pembangunan manusia Indonesia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah tersebut menjadi ancaman dalam mewujudkan agenda tujuan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs). Indonesia merupakan satu dari 189 negara yang meratifikasi piagam MDGs. Dengan meratifikasi piagam MDGs, Negara berkewajiban melaksanakan seluruh kesepakatan tertuang dalam piagam itu.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia. Pertama, menikmati panjang usia dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup). Kedua, menikmati pendidikan (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi). Ketiga, memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli atau penghasilan yang diperoleh) (Mulyani et al., 2017).

Setelah dideklarasikan oleh 189 negara anggota PBB, proyek pembangunan global yang dinamakan Millennium Development Goals (MDGs) mengharuskan negara maju untuk menyisihkan 0,7% dari oroduk domestic bruto (PDB) untuk membantu Negara miskin di seluruh dunia. Negara maju yang tergabung dalam G8 sebuah kelompok negara yang hanya berjumlah penduduk 14 persen dari total populasi dunia (sekitar 856 juta orang) tetapi menguasai 63 persen gross domestic product (GDP) dunia yang setara dengan US\$ 28 trilyun.

Table 1. Official Development Assistance (ODA) negara terkaya di dunia

Country and Aid as % of GNI	Country and Aid as % of GNI	Country and Aid as % of GNI
*Australia 0,25	Luxembourg 0,85	Germany 0,28
Austria 0,24	Netherland 0,74	Greece 0,23
Belgium 0,41	*New Zealand 0,23	Ireland 0,39
*Canada 0,26	Norway 0,87	Italy 0,15
Denmark 0,84	Finland 0,35	Portugal 0,63
*Japan 0,19	France 0,42	Spain 0,26
United Kingdom 0,36	*Switzerland 0,37	Sweden 0,77
*United State 0,16		

Tabel 1 menampilkan persentase Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance atau ODA) dari Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income atau GNI) untuk beberapa negara terkaya di dunia. The Millennium Project mengkalkulasikan bahwa biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam MDGs ini kiranya mendekati setengah % dari GNP

Negara-negara industri maju. Jumlah ini bahkan telah melebihi dari 0,7% yang dijanjikan Negara-negara kaya dalam konferensi Monterrey untuk membangun Negara-negara miskin. Lima negara di eropa telah menyediakan 0,7% atau lebih dari gross national income (GNI) untuk disumbangkan, diantaranya 16 dari 22 negara (15 negara UE ditambah Norwegia) juga telah mengumumkan rencana-rencana dan batas waktu untuk mencapai 0,7%. Sedangkan enam Negara yakni Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan Amerika Serikat belum menentukan batas waktu untuk mencapai 0,7% tersebut.

Komitmen negara maju terhadap ODA sangat penting untuk mencapai tujuan MDGs. Negara-negara yang belum mencapai target 0,7% harus meningkatkan kontribusi mereka untuk mendukung pembangunan global. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ODA dapat membantu memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.

Untuk Indonesia, upaya untuk meningkatkan IPM harus terus ditingkatkan dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program-program seperti BOS perlu diperluas dan ditingkatkan efektivitasnya untuk memberikan dampak yang lebih besar.

KESIMPULAN

Tujuan utama proyek global ini adalah untuk mengurangi jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan diseluruh dunia. Parameter dari target MDGs adalah mereka yang hidup dengan biaya kurang dari biaya 2 dollar AS perhari. Diperkirakan saat ini ada sekitar 1,3 miliar orang yang masuk kategori tersebut. Dari jumlah ini 800 juta penduduk dunia menderita kelaparan dan kekurangan gizi, 600 tidak memiliki akses air bersih dan sebanyak 115 juta tidak mampu mengakses pendidikan. Indeks pembangunan manusia (IPM)/human development index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, Negara berkembang atau negara terbelakan dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan data, diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), United National Information Centre (UNIC), Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perpustakaan Fisip Unpas, dan perpustakaan Fisip Unpad.

REFERENSI

- Adisasmito, W. (2008). Analisis Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional. *Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*.
- Asra, A. (2000). Poverty and inequality in Indonesia: Estimates, decomposition and key issues. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 5, 91-111.
- Bappenas. (2005). Laporan perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia. 22 Agustus 2005.
- Hannan, A. (2018). Strategi Penguatan Pembangunan Madura Yang Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Nilai Kearifan Lokal. *Simulacra*, 1(1), 19-42.
- Holsti, K. J. (1995). *International politics: A framework for analysis*. New Jersey: Prentice Hall.

- Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muchtar, A. F. (2014). *Menyusun Business Plan*. Elex Media Komputindo.
- Mulyani, E., Suripto, S., NUZIA, W., & Fatmasari, R. (2017). Ekonomi pembangunan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11).
- Ramadhani, R. S., & Majapahit, I. (2014). Strategi komunikasi corporate social responsibility pt. Tjiwi kimia tbk. Indonesia dalam pencegahan masalah hiv & aids.
- Samsudin, B. (2004, August). HRD menilai kesejahteraan manusia bermartabat. *Kompas*.
- Soerjono, S. (2003). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryadi, A. (1999). *Pendidikan, investasi SDM dan pembangunan: Isu, teori dan aplikasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Todaro, M. P. (2000). *Economic development*. Massachusetts: Addison-Wesley.
- UNDP. (2001). *Human development report 2001, Towards a new consensus*. BPS, BAPPENAS, & UNDP Indonesia.
- UNDP. (2004). *National development report 2004, The economics of democracy: Financing human development in Indonesia*. BPS, BAPPENAS, & UNDP Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Yuningsih, A. (2007). Peran dan Komitmen Indonesia dalam "Millenium Development Goals":(Perspektif Humas Internasional). *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 257-270.
- MDGs di Indonesia bergerak mundur. (2008, February 18). *Climate Change*. Retrieved from <http://www.antara.go.id/arc/2007//4/20/mdgs-di-indonesia-bergerak-mundur>